

Complementary Interest Amerika Serikat pada Latihan Gabungan Garuda Shield Tahun 2011 – 2021

Zasindu Amaral
Renitha Dwi Hapsari

Program Studi Hubungan Internasional
UPN “Veteran” Jawa Timur

email: amaralzasindu99@gmail.com

ABSTRACT

The United States has complementary interests to maintain its hegemony and influence in the Southeast Asian region, because its hegemony is slowly disappearing due to the rising power of China. The United States balances to maintain its hegemony by participating in the South China Sea issue and issuing the Pivot to Asia policy to dispel China's aggressiveness in Southeast Asia. One of them is by conducting IMET (International Military Education Training) with Indonesia in the Garuda Shield Joint Exercise. This study uses qualitative research methods using the concepts of complementary interest and balance of power. The author will analyze the complementary interests of the United States in carrying out the Garuda Shield Joint Exercise with Indonesia in 2011-2021 and the United States in carrying out complementary interests in the Southeast Asian region to balance China's power by carrying out military cooperation with Indonesia which were influenced by China's aggressiveness with the BRI policy and the South China Sea dispute.

Keywords: *Balancing, Nation Interest, South China Sea, United States, ASEAN*

Amerika Serikat memiliki kepentingan complementary interest untuk mempertahankan hegemoninya dan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, karena hegemoninya yang mulai perlahan menghilang disebabkan oleh kebangkitan kekuatan dari China di kawasan. Amerika Serikat melakukan balancing untuk mempertahankan hegemoninya dengan ikut serta dalam permasalahan Laut Tiongkok Selatan dan mengeluarkan kebijakan Pivot to Asia untuk menghalau keagresifan Tiongkok di Asia Tenggara. Salah satunya dengan melakukan IMET (International Military Education Training) dengan Indonesia dalam Latihan Gabungan Garuda Shield Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan konsep complementary interest dan balance of power. Penulis akan menganalisis complementary interest Amerika Serikat dalam melakukan Latihan Gabungan Garuda Shield dengan Indonesia pada tahun 2011-2021 dan Amerika Serikat melakukan complementary interest pada kawasan Asia Tenggara untuk mengimbangi kekuatan China dengan melakukan kerjasama dengan Indonesia yang dipengaruhi oleh keagresifan China dengan kebijakan BRI dan sengketa Laut China Selatan.

Kata Kunci: *Balancing, Nation Interest, Laut China Selatan, Amerika Serikat, ASEAN*

Pendahuluan

Pada tahun 2000-an hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat mengalami normalisasi, hingga pada tahun 2005, kerja sama yang sebelumnya terhenti kembali berlanjut. Normalisasi hubungan Amerika Serikat dan Indonesia pada tahun 2005 juga meningkatkan kerja sama dan diplomasi di kedua negara. Kerjasama yang ditingkatkan meliputi kerjasama pendidikan dan pelatihan yaitu IMET (*International Military Education Training*) dengan mengirimkan perwira-perwira TNI terpilih ke Amerika Serikat untuk

mengikuti pelatihan, serta pembentukan latihan gabungan militer pada tahun 2007 yaitu Garuda Shield (Darlis, 2021).

Latihan bersama Garuda Shield dilakukan mulai tahun 2007 berdasarkan normalisasi kerjasama antara Indonesia serta Amerika Serikat pasca peristiwa Timor Timur. Latihan militer bersama Garuda Shield semakin intens ketika Amerika Serikat mencanangkan kebijakan di Asia di tahun 2011. Hal ini dipicu oleh kebangkitan Tiongkok serta tindakan Tiongkok yang melakukan klaim sepihak pada perairan Tiongkok Selatan. Amerika Serikat melihat kawasan perairan Tiongkok Selatan ini menjadi semakin tidak terkendali saat Tiongkok mulai menguasai daerah tersebut. Amerika Serikat mulai melakukan diplomasi ke negara-negara yang bersinggungan langsung dengan kawasan tersebut, tidak hanya Indonesia, Amerika Serikat juga melakukan kerjasama dan diplomasi bersama negara Filipina, salah satunya yakni melakukan latihan militer gabungan, yang dinamakan Balikatan mulai tahun 2003 hingga sekarang yang berawal dari disepakatinya program IMET (*International Military Education Training*) dan MLSA (*Mutual Logistic Support Agreement*) pada akhir tahun 2002 (Bollerdo, 2021).

Latihan bersama Garuda Shield dikembangkan untuk meningkatkan koordinasi militer antara Angkatan Darat Indonesia dan Divisi Infanteri ke-25 AS, untuk mempromosikan hubungan bilateral antara Indonesia dan AS, dan untuk meningkatkan kemampuan negara-negara yang mengerahkan pasukan PBB. Latihan militer bersama antara US Army dan TNI AD tidak serta merta menunjukkan kedekatan Indonesia dengan AS karena Indonesia memiliki konsep bebas aktif, namun latihan bersama ini menunjukkan keterbukaan Indonesia terhadap negara lain selain China karena hubungan Indonesia dengan China di lapangan Indonesia melakukan kerja sama dan diplomasi dengan kawasan karena ekonomi relatif menguntungkan, menutupi fakta bahwa Indonesia tidak terlalu dekat dengan China (Manurung, 2021).

Sejak 2007 hingga 2021, latihan bersama bernama Garuda Shield dilakukan setiap tahun. Tujuan dari latihan bersama ini adalah untuk meningkatkan dan memperluas keterampilan perang pasukan. Peningkatan kemampuan operasional prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB dengan topik Operasi Dukungan Perdamaian adalah tema yang disampaikan pada awal latihan bersama Garuda Shield dan yang membedakannya dari latihan Garuda Shield yang lain setiap tahunnya. Garuda Shield merupakan event tahunan yang berlangsung di Indonesia selama dua minggu (Mahayana, 2021).

Latihan militer gabungan Balikatan dan Phiblex memberikan pengaruh positif bagi Filipina, menurut Renato Cruz De Castro (2009) dalam artikel berjudul *The US-Philippine Alliance: An Evolving Hedge Against an Emerging China Challenge*. Selain latihan bersama Balikatan dengan tahun 2008, Amerika Serikat membantu Filipina dalam pembangunan dan renovasi jalan raya, pelabuhan, rumah sakit, dan landasan pacu di Luzon dan Mindanao agar dapat digunakan kapan saja. Di masa depan, Amerika Serikat akan terus berkerjasama dengan Filipina. Latihan gabungan militer reguler ini memastikan aliansi kedua negara, terutama Filipina dan Amerika Serikat, dapat merespons dengan cepat krisis keamanan di kawasan.

Dari beberapa penelitian tersebut, penulis menemukan kesenjangan penelitian yakni belum ada yang menerangkan apa kepentingan Amerika Serikat dalam melakukan latihan militer gabungan Garuda Shield ini, penelitian sebelumnya sempat membahas kepentingan

Amerika Serikat dalam melakukan latihan militer gabungan ini, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik. Selain itu penelitian sebelumnya juga hanya berfokus pada peran Indonesia dalam melakukan diplomasi pertahanan dengan Amerika Serikat. Maka penulis akan mencoba mengulas kepentingan Amerika Serikat khususnya *complementary interest* dalam melakukan latihan militer gabungan Garuda Shield ini pada tahun 2011 – 2021.

Landasan Teori

Konsep Kepentingan Nasional

Hans J. Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kapasitas negara untuk mempertahankan identitas fisik, politik dan budayanya di hadapan campur tangan pihak luar. Dalam dunia politik internasional, kepentingan nasional merupakan faktor yang sangat menentukan. Ada dua jenis kekuatan: kekuatan lunak dan kekuatan keras. *Hard power* menghasilkan perang, sedangkan *soft power* lebih kooperatif atau diplomatis. Kepentingan nasional adalah tujuan yang ingin dicapai suatu negara. *Hard Power* dikenal dengan kekuatan yang memprioritaskan militernya. Namun komponen militer ini juga terdiri dari *soft power*, juga kekuatan fisik, sebagai salah satu ilustrasi. kerjasama atau diplomasi dalam kaitannya dengan keamanan dan pertahanan (Morgenthau, 1951).

Thomas W. Robinson membagi kepentingan nasional suatu bangsa ke dalam beberapa kategori, seperti: *primary interest*, *secondary interest*, *permanent interest*, *variable interest*, *general interest*, *specific interest*, *identical interest*, *complementary interest*, *conflicting interest*. Kepentingan nasional yang melindungi identitas fisik, politik, dan budaya dari intervensi luar dianggap sebagai *primary interest*. Kepentingan *primary interest* ini tidak dapat dinegosiasikan atau dialihkan. Semua negara dengan kepentingan nasional ini harus melindunginya apapun yang terjadi. *secondary interest* merupakan upaya negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan membangun bangsa dan melindungi orang asing. Mereka adalah diplomat dan warga negara asing dari negara yang diberikan kekebalan. *permanent interest* adalah kepentingan nasional atau negara jangka panjang, sering berubah, dan sebagian besar stabil yang disadari oleh suatu negara. *variable interest*, atau kepentingan nasional yang ditetapkan oleh suatu negara pada periode tertentu, berupaya mewakili suatu negara melalui opini publik, prinsip politik dan moral, dan kepentingan sebagian negara. *General interest* adalah kepentingan nasional yang secara aktif diupayakan oleh suatu negara dalam wilayah geografis yang luas, lintas banyak negara, atau dalam sektor tertentu seperti perdagangan, ekonomi, hukum internasional, dan diplomasi. *Specific interest*, adalah kepentingan yang didefinisikan dengan jelas pada periode atau lokasi tertentu dan seringkali merupakan hasil dari kepentingan publik. Thomas W. Robinson memaparkan *complementary interest*, yakni kepentingan yang meskipun tidak identik, kepentingan yang saling melengkapi antar negara adalah kepentingan yang dapat menjadi landasan kesepakatan setidaknya pada isu-isu tertentu (Robinson, 1967).

Konsep Perimbangan Kekuatan (Balancing)

Konsep "*balance of power*" Hans J. Morgenthau, adalah landasan teori realis dan neorealis tradisional yang berusaha menjelaskan keseimbangan kekuasaan. Dua opsi disajikan oleh konsep *Balance of Power*: *balancing* dan *bandwagoning*. Dengan meningkatkan sumber daya internalnya dan menjalin aliansi dengan negara lain sebagai kekuatan eksternal, suatu negara berupaya menyeimbangkan pengaruh negara atau koalisi lainnya. Negara yang lebih

lemah sering terlibat dalam *balancing* sebagai upaya menghindari konflik dengan lawan-lawannya (Morgenthau 1985; Thompson 1985).

Belakangan, neorealis Kenneth Waltz mengembangkan konsep *balance of power*. Kenneth Waltz berpendapat bahwa keseimbangan kekuatan politik akan berhasil jika dua kriteria terpenuhi: sistem internasional yang anarkis dan dunia yang penuh dengan negara yang menuntut kelangsungan hidupnya. Negara mempertahankan eksistensinya dengan memperkuat kekuatan internalnya melalui kekuatan militer dan ekonomi, atau dengan memperkuat kekuatan eksternalnya melalui kerjasama atau aliansi. Menurut Kenneth Waltz, pemerintah berupaya menyeimbangkan bahaya dari negara lain. Selanjutnya, Stephen M. Walt berpendapat bahwa ada empat elemen memengaruhi kesadaran akan ancaman dari negara lain: kekuatan lawan, kedekatan geografis, kemampuan ofensif, dan tujuan agresif (Waltz, 1979).

Kekuatan lawan, Semakin besar total sumber daya suatu negara (yaitu populasi, kemampuan industri dan militer, kemampuan teknologi), semakin besar potensi ancaman yang dapat ditimbulkannya terhadap negara lain. Negara-negara dengan kekuatan besar memiliki kemampuan untuk menghukum musuh atau memberi penghargaan kepada negara sahabat, sehingga gabungan kekuatan negara lain dapat menjadi motif keseimbangan. Dengan demikian, kekuatan umum negara merupakan bagian penting dari ancaman terhadap negara lain. Karena kedekatan geografisnya, negara-negara menanggapi ancaman dari kekuatan tetangga. Karena kemampuan memproyeksikan kekuatan berkurang dengan jarak, jarak dekat merupakan ancaman yang lebih besar daripada jarak jauh. Kapasitas ofensif, negara dengan kapasitas ofensif yang lebih besar, mereka sangat mungkin memprovokasi negara atau aliansi lain daripada negara yang secara militer lebih lemah atau hanya dapat bertahan. Dengan ambisi menyerang, negara-negara yang terkesan agresif cenderung memprovokasi negara lain untuk menentangnya. Bahkan negara dengan karakteristik sederhana dapat memicu serangan balik jika dianggap sangat agresif. (Dwivedi, 2012)

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian eksplanatif kualitatif, Tipe penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang berisikan penjelasan tentang kedudukan diantara variabel variabel yang diteliti beserta hubungan diantara variable satu dengan lainnya melalui perumusan hipotesis yang diujikan (Sugiyono, 2013). Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan generalisasi dari sampel ke populasi, atau menjelaskan hubungan, perbedaan, atau pengaruh satu variabel pada yang lain (Bungin, 2010). Diharapkan dengan metode ini penulis dapat menjelaskan hubungan *complementary interest* Amerika Serikat dengan latihan gabungan Garuda Shield.

Hasil dan Pembahasan

China merupakan negara dengan kekuatan baru yang muncul setelah Perang Dingin berakhir. Sejak 1978, reformasi ekonomi China di bawah Deng Xiaoping telah memungkinkan negara itu berkembang dan menjadi kekuatan besar seperti sekarang ini. Sebelumnya, sistem ekonomi China terisolir, yang memperparah kondisi China; Namun begitu dibuka, ekonomi China terus meningkat hingga tahun 2010, ketika China mengambil alih Jepang sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia.

China meningkatkan otoritasnya di dunia, termasuk Asia. Karena perang mungkin terjadi setelah peristiwa masa lalu ketika kekuatan baru muncul untuk menantang hegemoni yang ada (Zhen dan Paul, 2020). Pertumbuhan Cina sebagai kekuatan baru menantang hegemoni Amerika Serikat sebagai negara adidaya lama. China bermaksud untuk mengurangi dominasi Amerika di kawasan tersebut dengan membentuk organisasi keamanan regional yang independen dari AS, terutama SCO, atau Organisasi Kerjasama Shanghai, yang didirikan China tanpa keterlibatan AS (Zhen dan Paul 2020). Meskipun China meluncurkan SCO dan mengaku tidak menentang kumpulan negara, China hanya mendirikan organisasi tersebut untuk berfungsi sebagai pemimpin dengan tujuan menyeimbangkan dominasi Amerika di wilayah tersebut. Presiden Xi Jinping menekankan pada konferensi CICA di Shanghai bahwa keamanan Asia "didukung oleh orang Asia", menunjukkan tekadnya untuk mengecualikan AS dari badan regional tersebut. Presiden Xi Jinping menghidupkan kembali pertemuan regional yang terbengkalai tanpa kehadiran Amerika Serikat dan sekutunya Jepang, Filipina, dan Singapura (Zhen dan Paul, 2020).

China semakin melebarkan sayapnya mengadopsi kebijakan Belt and Road Initiatives (BRI). Sejak peluncuran inisiatif BRI ini pada tahun 2013, hubungan China dengan kawasan Asia Tenggara semakin berkembang. Pertukaran budaya telah berlangsung antara China dan ASEAN sejak tahun 2014, dan program BRI mulai berdampak di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2015. Pada tahun 2016, kerjasama China-ASEAN semakin meluas. Karena kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya China dan Asia Tenggara, Asia Tenggara telah menjadi pelopor dalam pengembangan BRI (Akira, 2020). Pendekatan ini dilakukan oleh China untuk merusak kepemimpinan Amerika dalam pertumbuhan ekonomi regional. Di luar China, agenda BRI ini menuntut 65 negara dan 4,4 miliar orang untuk menciptakan outlet untuk kelebihan kapasitas industri, menyelidiki ketersediaan sumber daya, dan meningkatkan kerja sama keamanan nasional. Tujuan akhir pembangunan BRI adalah untuk mengubah tatanan internasional dan memposisikan China di pusat dunia. Kebijakan BRI ini merupakan strategi utama China untuk menghidupkan kembali jalur perdagangan darat dan laut yang bersejarah. China berjanji untuk menginvestasikan miliaran dolar dalam industri infrastruktur di Eurasia dan kawasan Indo-Pasifik di bawah prakarsa BRI ini. Asia Tenggara adalah pusat regional dan lokasi penting bagi Tiongkok untuk menjalin hubungan luar negeri dan keamanan nasional dengan negara-negara Indo-Pasifik, khususnya Asia Tenggara (Xue, 2020).

Asia Tenggara mempertahankan berbagai hubungan politik, ekonomi, dan budaya dengan Cina. Selain itu, signifikansi ASEAN dalam multilateralisme regional, serta menunjukkan netralitas kompetitifnya, merupakan elemen signifikan yang meningkatkan kepentingan geostrategis China. Dengan mendorong negara-negara untuk bergabung dalam inisiatif BRI, China menunjukkan manfaat dari kebijakan BRI. China menekankan bahwa Belt and Road Initiative (BRI) dapat mempertahankan dan meremajakan globalisasi dengan meningkatkan koneksi infrastruktur dan perdagangan regional dan global. China juga berpendapat bahwa BRI adalah upaya untuk menawarkan keuntungan publik, seperti rencana kerjasama Lancang-Mekong, yang merupakan bagian dari kebijakan BRI di Asia Tenggara dan telah mendukung banyak program pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang tumpang tindih. Pertanian, pengelolaan sumber daya air, pendidikan dan pelatihan adalah contoh usaha kecil dan menengah. Negara-negara Asia Tenggara yang termasuk dalam strategi BRI China antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, Myanmar, dan Kamboja (Chen, 2018).

Kebijakan BRI yang dicanangkan oleh Tiongkok khususnya di kawasan Asia Tenggara membawa dampak yang cukup signifikan bagi keberlangsungan kepentingan Amerika

Serikat di Asia Tenggara. Kebijakan BRI di Asia Tenggara dinamakan *China-Indochina Peninsula Economic Corridor (CICPEC)* atau biasa dikenal dengan *Nanning-Singapore Economic Corridor* yang menghubungkan 8 negara yakni Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh, Ho Chi Minh City, Vientiane, Hanoi, dan Nanning ibu kota dari Guangxi Zhuang daerah otonom bagian selatan Tiongkok. Dari sinilah jaringan mulai meluas ke pusat ekonomi Tiongkok yakni Guangzhou dan Hongkong, sehingga membentuk jaringan yang menghubungkan antara sepuluh kota dengan tingkat populasi yang lebih dari lima puluh juta (Luft, 2016).

CICPEC ini dibangun atas kerjasama ekonomi yakni kerjasama ekonomi greater Mekong Subregion GMS, jaringan kereta api Kunming–Singapura atau disebut dengan kereta api Pan Asia, dan perjanjian masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) yang ditandatangani pada november 2015 (Luft, 2016). Kerjasama GMS sudah mengoperasikan sembilan koridor transportasi darat yakni yang menghubungkan antara Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam dengan provinsi Yunnan dan Guangxi di Tiongkok. Beberapa proyek konstruksi yang telah direncanakan selesai dibangun, diantaranya, wilayah Guangxi yang dihubungkan dengan jalan tol menuju gerbang dan pelabuhan Dongxing di wilayah perbatasan Tiongkok-Vietnam. Selain itu provinsi ini telah membuka jalur dari kereta api internasional yang membentang dari Nanning ke Hanoi, serta jalur udara ke kota kota besar di Asia Tenggara. Di sisi maritim, Tiongkok bekerja sama dengan Malaysia dalam proyek pelabuhan bersama di Malaka, dan juga melakukan kerjasama dengan Thailand dalam meningkatkan jaringan rel lintas batas yang menghubungkan antara Laem Chabang dan Map Ta Phut yakni dua pelabuhan terbesar yang dimiliki oleh Thailand dengan Nong Khai, kawasan perbatasan industri yang berada di dekat ibukota Laos di Vientiane ke Kunming Tiongkok. Sedangkan jalur lainnya akan menghubungkan Chiang Rai, yang berada di ujung utara Thailand ke Ayutthaya yang berada tepat di utara Bangkok (Luft, 2016).

Asia Tenggara menempati posisi yang sentral dalam strategi BRI karena kedekatan geografis, kebutuhan infrastruktur dan pasar negara berkembang. Tiongkok memastikan kebijakan BRI meningkatkan interkoneksi dalam terlibat pembangunan kereta api, jalan dan pelabuhan di wilayah investasi BRI. Negara negara Asia Tenggara merasa khawatir akan meningkatnya pengaruh politik Tiongkok dan potensi akan adanya beban utang (Ujvari, 2019). Beberapa negara di kawasan tersebut memang menyetujui akan kerjasamanya dengan Tiongkok atas BRI namun, mereka tetap waspada terhadapnya dan BRI merupakan tantangan bagi ASEAN untuk menghindari dari jebakan utang dan juga persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok (Ujvari, 2019)

Dalam konflik maritim dengan tetangganya, khususnya aliansi AS-Jepang-Filipina, China lebih kuat. Pengabaian perbatasan laut dengan kedok "*nine dash line*", berdasarkan klaim PBB sebelumnya, melegitimasi klaim batas laut China yang luas, dan karenanya klaim China atas sengketa tersebut, khususnya Laut China Selatan. Konflik maritim mempengaruhi hampir semua negara anggota ASEAN yang berbatasan dengan Laut Cina di selatan, termasuk Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Pendekatan China, yang tampaknya menentang penyelesaian damai konflik maritim dan teritorial melalui arbitrase internasional, penilaian, dan proses dengan pihak ketiga, membuat China bertentangan dengan praktik pemerintah Asia dan global lainnya. (Melita et al. 2018)

Karena konflik teritorial maritim di Laut China Selatan, klaim sepihak China telah menggoyahkan kawasan Asia Tenggara dan meningkat; akibatnya, AS ada di sini untuk

menstabilkan kawasan tersebut sehingga tidak ada kekuatan tunggal yang mengendalikannya. Sengketa Laut China Selatan mempengaruhi banyak negara Asia Tenggara, menjadikan China salah satu bahaya paling serius di kawasan ini. Karena Filipina adalah salah satu negara berseberangan dengan China, Amerika Serikat harus ada ketika negara-negara sekutu menghadapi tantangan atau perselisihan dengan negara lain. Adanya isu Laut China Selatan di kawasan Asia Tenggara menjadi perhatian pemerintah kawasan. Indonesia adalah salah satunya. Isu Laut China Selatan membahayakan kepentingan Indonesia, yakni keselamatan Kepulauan Natuna yang kaya akan sumber daya alam. Kepulauan Natuna berukuran 100.000 kilometer persegi, dan kekayaan lautnya diperkirakan mencapai 500.000 ton ikan setiap tahun. Selain itu, Indonesia memiliki salah satu cadangan gas terbesar dunia, dengan total sekitar 46 triliun kaki kubik yang dikuasai Pertamina bekerja sama dengan ExxonMobil (Supriyanto, 2016). Semua itu terhambat oleh klaim China atas tanahnya di sepanjang garis berbentuk U yang diklaim oleh China pada tahun 2009, oleh karena itu Indonesia membalas dengan membuat pernyataan bahwa klaim China tidak memiliki dasar hukum internasional dan tidak mengakui Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hak Asasi Manusia. Hukum Laut. Indonesia melihat China sebagai sumber masalah di kawasan Asia Tenggara karena tindakan agresifnya atas klaim teritorialnya di Laut China Selatan; jika suatu hari bantuan asing diperlukan, kerja sama militer dengan AS mungkin diperlukan (Supriyanto, 2016).

Filipina juga terkait dengan China karena klaim China di Laut China Selatan. Berbeda dengan Indonesia yang berusaha menyelesaikan perselisihannya dengan China, Filipina menyelesaikan konfliknya dengan China melalui Permanent Court of Arbitration (PCA). Filipina memanfaatkan PCA untuk mengumpulkan dukungan internasional dalam perjuangannya melawan klaim sepihak China. Sejak 2013, Filipina telah menggunakan PCA. Reaksi China adalah bahwa tindakan Filipina lebih mirip dengan perselisihan dengan pihak ketiga daripada diskusi bilateral. PCA mengungkapkan kesimpulannya pada tahun 2016 dan memenangkan kasus Filipina melawan China (Lobakeng, 2016).

Brunei Darussalam, negara Asia Tenggara juga berselisih dengan China atas klaim Laut China Selatan. Brunei Darussalam, di sisi lain, adalah negara kecil dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Brunei Darussalam adalah negara terkecil dan terlemah di Laut Cina Selatan. Selain itu, Brunei tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melawan agresivitas China yang semakin meningkat, serta pertempuran antara China dan AS di kawasan Asia Tenggara ini. Brunei sadar bahwa pemimpinnya terlalu kecil untuk bersaing dengan China, sehingga negara tersebut berusaha menghindari konfrontasi dengan China. Dibandingkan dengan negara lainnya, Brunei telah meningkatkan kemampuan militer dan pertahanannya. Brunei, seperti pada tahun 2014, ikut serta dalam RIMPAC, latihan angkatan laut multinasional terbesar di kawasan itu, yang pertama dilakukan oleh Amerika Serikat. Selanjutnya, Brunei meningkatkan hubungan strategis dengan Vietnam dan Filipina pada tahun 2015, karena kedua negara tersebut adalah yang paling gencar dan mengambil posisi terkuat atas klaim Laut Cina Selatan (Roberts dan Malcolm, 2016).

Vietnam merupakan negara yang gencar menentang klaim China atas Laut China Selatan. China menetapkan Undang-Undang Perairan Teritorial pada tahun 1992. Kejadian ini menyebabkan konflik berkepanjangan antara Vietnam dan China. Untuk mengurangi bahaya konfrontasi dan untuk mengatur operasi negara-negara yang saling bergantung satu sama lain, ASEAN dan China membuat konsensus luas dalam bentuk Deklarasi Para Pihak di Laut China Selatan (DoC) pada tahun 2002. Kalaupun kesepakatan didirikan, perjanjian ini tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang mengikat. Ketegangan di Laut Cina Selatan telah meningkat sebagai akibat dari klaim kedaulatan yang diperebutkan banyak

negara, mendorong pemerintah untuk menaikkan anggaran pertahanan mereka. China menghabiskan 255,713 miliar dolar AS dan 5,005 miliar dolar AS untuk militer pada tahun 2016, dan baik China maupun Vietnam telah meningkatkan pengeluaran pertahanan. Dalam hal kekuatan dan kebijakan ekonomi, China dan Vietnam memiliki hubungan yang tidak setara. Akibatnya, Vietnam akan ragu-ragu untuk melawan undang-undang anti-China di pengadilan internasional, seperti yang dilakukan Filipina, tetapi sebaliknya akan mencari penyelesaian diplomatik sambil terus menuntut China (Gurung, 2018).

Malaysia adalah negara terakhir yang bersengketa dengan China atas Laut China Selatan. Malaysia tidak diragukan lagi ingin menyelesaikan masalahnya secara baik baik dengan China. Malaysia menggunakan diplomasi diam-diam, yang berarti memilih untuk menyampaikan kepentingannya dalam menyelesaikan masalah Laut China Selatan dengan China secara pribadi daripada secara terbuka menyatakan bahwa akan mengambil tindakan serius untuk mengatasi masalah tersebut. Malaysia juga telah mengambil langkah-langkah diplomatik, keamanan, hukum, dan ekonomi yang memadai untuk melindungi hak-haknya. Pernyataan klaim China atas Nine-Dash Line Laut China Selatan, berdasarkan klaim sejarah, tidak memiliki dasar hukum dan memiliki dampak langsung bagi Malaysia. Jika garis sembilan putus China diberlakukan, Malaysia akan kehilangan hampir empat per lima ZEE-nya di Sabah dan Sarawak, yang berhadapan dengan Laut China Selatan dan termasuk cadangan minyak dan gas aktif (Parameswaran, 2016).

ASEAN, sebagai organisasi regional yang mengatur negara-negara Asia Tenggara, harus terlibat dalam kesulitan yang dihadapi para anggotanya. ASEAN menganut prinsip non-interference, yang berarti jika salah satu negara anggotanya memiliki masalah, negara anggota lainnya tidak akan ikut campur dalam urusannya. Selain non-intervensi, ASEAN memiliki banyak nilai tambahan, termasuk hak untuk bebas dari campur tangan pihak luar, hak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tanpa perselisihan yang berlebihan, larangan kekerasan, dan kolaborasi yang efisien antar anggota. Efektivitas organisasi regional seperti ASEAN tergantung pada komitmen masing-masing negara anggota terhadap kepemimpinan organisasi regional tersebut (Hazmi, 2020). Salah satu hal yang harus diprioritaskan dalam rangka mewujudkan ketertiban wilayah di daerah adalah prioritas organisasi. ASEAN didirikan atas dasar multilateralisme, dengan tujuan menyeimbangkan kekuatan politik negara-negara dominan di kawasan atau dominasi kekuasaan yang tidak merata (Parameswaran, 2016).

Sejauh ini, upaya Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Selatan sebagian besar terdiri dari Operasi Kebebasan Navigasi (FONOPs), di mana kapal-kapal Angkatan Laut AS melintasi wilayah yang disengketakan. Tindakan ini diambil untuk melindungi hak-hak negara yang dijamin pada Konferensi PBB ketiga tentang Hukum Laut. Pasalnya, kekuatan Angkatan Laut AS kerap dijadikan taktik masuk bagi AS untuk menanggapi klaim maritim negara mana pun yang tidak proporsional (Larter, 2020).

FONOP di Laut Cina Selatan ini biasanya memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah menolak klaim maritim China yang dibesar-besarkan di wilayah tersebut, seperti tuduhan bahwa pulau-pulau yang terendam memberi China laut teritorial hingga 12 mil, dan yang kedua adalah menentang FONOP Amerika. Dengan melintasi 12 mil laut dari wilayah yang diperebutkan, Serikat pekerja menolak klaim tersebut. Sejak 2015, ada lima hingga enam FONOP setiap tahun, dengan total sembilan FONOP di tahun 2019 (Macias, 2020).

Pivot to Asia merupakan kebijakan luar negeri AS yang dikeluarkan oleh Presiden Barack Obama pada tahun 2011. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kemunculan China sebagai negara maju mengikuti Amerika Serikat, serta aktivitas China yang terus melebarkan sayap kekuasaannya ke wilayah negara lain. , yang menyebabkan Amerika Serikat membuat kebijakan yang mengarah pada wilayah yang ingin dikuasai China yaitu Asia, khususnya Asia Tenggara. Program Pivot to Asia dilaksanakan setelah Presiden Barack Obama menjabat selama dua tahun. Selama bertahun-tahun, kawasan Asia Pasifik telah menjadi fokus utama Amerika Serikat. Munculnya kebijakan Pivot to Asia ini mendorong Amerika Serikat untuk meluncurkan strategi prioritas baru, yaitu menekankan dan meningkatkan sumber daya untuk diplomasi, perdagangan, dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik, dan pada masa kepemimpinan Presiden Obama itulah Amerika Serikat secara eksplisit menciptakan Asia untuk pertama kalinya. Secara tradisional area utama untuk Amerika Serikat, terutama Timur Tengah dan Amerika Latin (David, 2013).

Kepemimpinan Presiden Obama menjadikan wilayah Asia menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, seperti yang dikatakan oleh Obama di dalam pidatonya saat membuka parlemen Australia pada 17 November 2011 *“I have made a deliberate and strategic decision as a Pacific nation, the United States will play a larger and long-term role in shaping this region and its future”* (saya telah membuat keputusan yang strategis, sebagai negara pasifik, Amerika Serikat akan memainkan peran yang lebih besar dan jangka panjang dalam membentuk kawasan ini dan masa depannya) (Emmers, 2015). Presiden Obama mengunjungi wilayah tersebut kurang lebih setidaknya setiap tahun sejak menjabat. Hal tersebut merupakan kehadiran pertama seorang presiden Amerika Serikat di KTT Asia Timur dan pertemuan para pemimpin ASEAN dan melakukan kunjungan individu ke Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Australia, Indonesia, Singapura, dan India. Amerika Serikat memiliki investasi lebih besar ketimbang Tiongkok di Asia Tenggara pada tahun 2013 (Davidson, 2013). Presiden Obama telah mengambil beberapa fokus di kawasan Asia Tenggara untuk menyempurnakan kerjasama diplomatik multilateral antara Amerika Serikat dengan kawasan Asia Tenggara yang diwakili oleh duta besar Amerika Serikat untuk ASEAN yakni, mempromosikan ASEAN sebagai kendaraan utama bagi diplomasi multilateral Washington di Asia Tenggara dan wilayah yang lebih luas (Euan, 2013).

Inisiatif Jalur Sutra yang baru, yang diperkenalkan oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton pada tahun 2011, adalah program yang dibentuk oleh pemerintahan Presiden Obama untuk mengimbangi tujuan China dalam mengembangkan koneksi infrastruktur. Inisiatif Jalan Sutra yang baru berusaha untuk merevitalisasi ekonomi Afghanistan dengan membangun kembali hubungan transportasi dan energi dengan negara-negara tetangga. Konektivitas AS-ASEAN Melalui Inisiatif Perdagangan dan Investasi (USACTI), diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Obama pada tahun 2013, merupakan upaya bersama Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk mempromosikan integrasi ekonomi di Asia Tenggara dan menggempleng bisnis non-tradisional. Pada tahun yang sama, Departemen Luar Negeri meluncurkan gagasan Koridor Ekonomi Indo-Pasifik (IPEC), yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan energi regional baru serta meningkatkan koridor perdagangan dan transportasi (Kliman dan Grace, 2018).

Kebangkitan kekuatan baru memiliki dampak yang serius bagi sebuah negara yang telah lama menjadi kekuatan utama karena menganggap kekuatan baru tersebut sebagai saingan atau musuh karena telah mematahkan dominasinya di kawasan, yang mengakibatkan konflik sengit antara kedua negara. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan dan pertumbuhan China sebagai kekuatan baru, yang mematahkan hegemoni AS di kawasan, khususnya di

Asia dan khususnya di Asia Tenggara. China menerapkan inisiatif baru yang dikenal dengan OBOR (*One Belt One Road*) atau BRI (*Belt Road Initiatives*) yang ditujukan untuk negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara. China sangat serius dengan strategi barunya yang menyangkut Amerika Serikat. Ketegangan meningkat di kawasan Asia Tenggara, khususnya di kawasan Laut China Selatan, yang mengklaim wilayah maritim yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan, dan kawasan tersebut mengalami destabilisasi akibat China, sumber ketegangan, seperti China yang agresif, menimbulkan ancaman bagi negara-negara Asia Tenggara (Ujvari, 2019).

Dalam hal ini, Thomas W. Robinson menjelaskan fenomena ini sebagai *complementary interest*. *Complementary interest* merupakan kepentingan pelengkap, meskipun tidak identik, tetapi membentuk dasar kesepakatan atas isu-isu tertentu, dalam hal ini China memperkuat hegemoninya, khususnya di Asia Tenggara, melalui kebijakan BRI atau OBOR dan klaim agresif di Laut China Selatan menyebabkan ketidakstabilan kekuatan di wilayah tersebut. Negara-negara di Asia Tenggara khawatir dengan agresi China dalam memperluas dan memperkuat hegemoninya di kawasan yang menimbulkan ketegangan dan ketidakseimbangan kekuatan, serta memandang perlunya kekuatan besar lainnya untuk melawan agresivitas China. Akibatnya, AS merasa harus tetap berada di kawasan itu untuk menstabilkannya. Reaksi Amerika berkisar dari orientasi politik baru untuk Asia, terutama Pivot to Asia, memperkuat hubungan dengan mitra Asia dan Asia Tenggara, hingga melakukan latihan militer bersama atau latihan bersama dengan negara-negara Asia Tenggara (Shambaugh, 2013). Dalam pendekatan ini, AS ingin menunjukkan kepada China bahwa AS hadir di wilayah tersebut, yang terus tumbuh tidak stabil karena pertumbuhan kekuatan China.

Balancing atau perimbangan kekuatan adalah upaya suatu negara untuk menyeimbangkan kekuatan negara lain atau koalisi dengan memperkuat kekuatan internalnya dan membentuk aliansi dengan negara lain sebagai kekuatan eksternal. Dominasi Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara telah ditentang oleh tindakan China, termasuk *Belt and Road Initiative* dan masalah Laut China Selatan. Karena Amerika Serikat mengamati bahwa negara-negara ASEAN mulai bergantung pada China, dominasi Amerika Serikat di kawasan tersebut mulai berkurang. Selain itu, isu Laut China Selatan memberi kesan AS hadir di kawasan untuk menyeimbangkan kekuatan.

Kenneth Waltz mengatakan bahwa pemerintah yang terlihat agresif cenderung mendorong negara lain untuk menyeimbangkannya. Dalam skenario ini, China terlihat agresif dalam segala aspek, termasuk ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Dalam hal ekonomi, China menerbitkan kebijakan BRI dan menargetkan negara-negara di seluruh dunia. Kebijakan BRI menjadi lebih umum dan memiliki pengaruh signifikan terhadap negara-negara yang mengikutinya dan mendapat untung darinya. China sangat tegas dalam konflik Laut China Selatan dalam hal militer dan keamanan. Hal ini terlihat dari klaimnya yang bertahan hingga saat ini, di mana ia menolak berbagai penyelesaian sengketa, termasuk yang dikeluarkan oleh Permanent Court of Arbitration (PCA) dan diajukan oleh Filipina. Selain itu, tindakannya yang terus melakukan klaim di kawasan Laut China Selatan melanggar dan cenderung mengabaikan hukum UNCLOS yang digunakan oleh semua negara di dunia sehingga menimbulkan ketimpangan di kawasan Asia Tenggara karena kekuatan China yang paling besar di antara negara lain di Asia Tenggara yang sebagian besar merupakan negara berkembang.

Untuk mempertahankan eksistensinya, negara akan meningkatkan kekuatan internalnya dengan meningkatkan kekuatan militer dan ekonomi, atau memperkuat kekuatan eksternalnya melalui kerjasama atau aliansi. Amerika Serikat mengembangkan kekuatan eksternal melalui kerjasama pertahanan dan keamanan, yaitu melalui kerjasama militer dengan negara-negara di kawasan, khususnya Asia Tenggara. AS melakukan kerja sama militer dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang khususnya berseberangan dengan China, seperti Filipina dan Indonesia. Kerjasama dilakukan di Filipina melalui latihan militer bersama dengan Amerika Serikat yang dikenal dengan Balikatan. Latihan militer gabungan Balikatan diselenggarakan pada tahun 2021 oleh Amerika Serikat dan Filipina.

Amerika Serikat juga melakukan latihan militer bersama dengan Indonesia bernama Garuda Shield. Garuda Shield diadakan setiap tahun dan memiliki mata pelajaran yang berbeda setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2021, latihan militer gabungan Garuda Shield akan menjadi yang terbesar dalam sejarah kerja sama militer Indonesia-AS. Latihan bersama Garuda Shield dimulai pada 2007 sebagai bagian dari normalisasi kerja sama Indonesia-AS pasca insiden Timor Timur. Latihan militer gabungan Garuda Shield menjadi jauh lebih ketat ketika Amerika Serikat mendeklarasikan strategi fokus Asia pada tahun 2011. AS mengadopsi strategi ini ketika Presiden Barack Obama menjabat, khususnya "Pivot to Asia." Pivot Kebijakan ke Asia, dirilis oleh AS pada tahun 2011, dengan tujuan untuk menyeimbangkan kembali pengaruh AS di Asia. Latihan Gabungan Garuda Shield tidak diragukan lagi merupakan latihan bersama terbesar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2021. Sebab, secara keseluruhan jumlah prajurit US Army yang berangkat ke Indonesia sebanyak 1.547 orang, dan dihadiri oleh 2.161 personel TNI AD (Mahayana, 2021). Sementara itu, hanya 225 prajurit Angkatan Darat AS dan 415 personel militer Filipina yang mengikuti Latihan Bersama Balikatan yang digelar AS dan Filipina. Alhasil, latihan bersama Garuda Shield menjadi latihan terbesar yang dilakukan AS di Asia Tenggara pada 2021 (Bollerdo, 2021). Kebangkitan China sebagai kekuatan yang sedang marak melakukan ekspansi di kawasan Asia menjadi perhatian besar bagi pemerintahan Obama. Latihan militer bersama Garuda Shield penting bagi AS untuk mengimbangi kekuatan China karena Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menonjol di kawasan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu anggota pendiri organisasi ASEAN pada tahun 1967, sehingga suara Indonesia didengar oleh negara ASEAN lainnya.

Di Asia, Indonesia memainkan peran geopolitik yang terus berkembang. Setelah India dan Amerika Serikat, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dengan sejarah demokrasi dan militer yang kuat, Indonesia berkontribusi pada keamanan regional dan akan tetap menjadi mitra penting saat ketegangan AS-Tiongkok meningkat. Seperti terlihat dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengambil langkah yang cukup tegas dalam memberantas kapal illegal fishing, termasuk kapal penangkap ikan China, merambah laut di sekitar Kepulauan Natuna dengan menghancurkan kapal ilegal, berperan penting dalam menjaga kebebasan navigasi dan *overflight* di Laut Cina Selatan (Walker, 2021). Selanjutnya Indonesia sebagai negara yang menganut asas politik internasional bebas aktif, membebaskan Indonesia untuk mau berhubungan dan bekerjasama dengan negara manapun dan blok apapun tanpa terikat aliansi, sehingga Amerika Serikat memilih Indonesia karena Indonesia dapat bergerak bebas, untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah Indonesia merupakan negara dengan kekuatan terkuat kedua di Asia Tenggara dalam hal militer setelah Singapura, dan dengan kekuatan yang kuat tersebut, Indonesia menjadi negara paling berpengaruh di ASEAN menurut Asia Power

Index tahun 2021. Sehingga Indonesia dianggap sebagai negara yang cocok bagi AS untuk mengimbangi kekuatan China. Indonesia memandang Amerika Serikat sebagai mitra utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan kawasan dan internasional. Sejauh ini, kemitraan antara Amerika Serikat dan Indonesia membuahkan hasil. Latihan bersama Garuda Shield juga dilakukan untuk meningkatkan aliansi pertahanan antara AS dan Indonesia agar dapat terus mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka..

Kesimpulan

Hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia telah terjalin sejak lama, dengan pasang surut membawa kemitraan semakin erat. Kebangkitan China yang semakin maju menambah kekuatannya. Dengan kekuatannya yang sangat besar, China memberikan tantangan berbeda kepada Amerika Serikat karena mengancam hegemoni Amerika Serikat, yang telah lama menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Amerika Serikat prihatin dengan hegemoni China di kawasan tersebut, khususnya Asia Tenggara, yang diperparah oleh program BRI China dan klaim sepihak di Laut China Selatan.

China merilis BRI yang ingin mengubah struktur ekonomi internasional yang sebelumnya dipegang oleh Amerika Serikat menjadi milik sendiri dengan menggandeng berbagai negara berkembang, termasuk negara-negara ASEAN, untuk berpartisipasi dalam kebijakannya. Selain itu, China terus melakukan penegasan secara sepihak di Laut China Selatan sehingga membuat kawasan tersebut tidak stabil. Amerika Serikat memiliki kepentingan dalam topik ini dan berfungsi sebagai dasar bagi Amerika Serikat untuk memiliki kepentingan yang saling melengkapi. Akibatnya, Amerika Serikat menanggapi dengan melakukan tindakan penyeimbang dengan mengeluarkan kebijakan untuk mencegah Cina semakin merebut hegemoninya, dimulai dengan kebijakan Pivot to Asia dan dilanjutkan dengan kebijakan FONOP, yaitu dengan mengirimkan kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat ke berpatroli di wilayah yang disengketakan agar agresivitas China mereda. Selanjutnya, Amerika Serikat melakukan IMET atau latihan militer internasional di kawasan Asia Tenggara, khususnya Balikatan dengan Filipina dan Garuda Shield dengan Indonesia, yang menjadi latihan gabungan terbesar AS di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2021, dan hal tersebut merupakan sebagai bentuk dari *complementary interest* Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Tenggara.

Referensi

Buku

Hans, J. M. (1948). *Politics Among Nations : The Struggle of Power and Peace*. New York: McGraw Hill .

Jurnal

Arry, B., & Junita, B. R. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*.

Beckman, R. e. (2013). *Beyond Territorial Disputes in the South China Sea: Legal Frameworks for the Joint Development of Hydrocarbon Resources*. Edward Elgar.

Campbell, K. &. (2013). *Explaining the US 'pivot' to Asia*. Americas.

Chen, C. (2018). 2018. *Political and Economic Research on "One Road, One Road" and Southeast Asian Chinese*.

- David, S. (2013). Assessing the US "Pivot" to Asia. *Strategic Studies Quarterly*.
- Davidson, J. (2014). The U.S. "Pivot to Asia. *American Journal of Chinese Studies*. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/44289339>
- DE CASTRO, R. C. (2009). The US-Philippine Alliance: An Evolving Hedge against an Emerging China Challenge. *Contemporary Southeast Asia*.
- Emmers, R. (2015). The US Rebalancing Strategy: Impact on the South China Sea. ANU National Security College.
- Euan, G. (2013). Southeast Asia in the US Rebalance: Perceptions from a Divided Region. *Contemporary Southeast Asia*.
- Gurung, A. S. (2018). China, Vietnam, and The South China Sea. *Indian Journal of Asian Affairs*, Vol 31.
- Han, Z., & T.V, P. (2020). China's Rise and Balance of Power Politics. *The Chinese Journal of International Politics*.
- Ian, M. Y. (2017). Bargaining: Revisi Teori Perimbangan Kekuatan Dalam Hubungan Diplomas Indonesia, Malaysia, Cina Dan Amerika Serikat. *Intermestic: Journal of International Studies*.
- Inkiwang, F. W. (2021). 'Garuda shield' vs 'sharp knife'. *The Pacific Review*.
- Jiawen, C. (2018). Impact of China's "Belt and Road" Initiative on Singapore, Reform and Opening. *Shenzhen University*.
- Lobakeng, R. (2016). The South China Sea Dispute: Why the Philippines used the Permanent Court of Arbitration to gain international sympathy in their fight with China. *Institute for Global Dialogue*.
- Luft, G. (2017). The Anatomy of the BRI's Impact on US Interest . *Atlantic Council*.
- Manurung, H. (2021). THE GARUDA SHIELD 15/2021. doi:10.13140/RG.2.2.16624.38402
- McLaughlin, M. (2020). U.S Strategy in the South China Sea. *American Security Project*.
- Parameswaran, P. (2016). Malaysia's Approach to the South China Sea Dispute after the Arbitral Tribunal's Ruling. *Contemporary Southeast Asia*, Vol 38, No. 3.
- Roberts, C. B., & Malcolm, C. (2016). Brunei Darussalam: Challenging Stability. *Southeast Asian Affairs ISEAS - Yusof Ishak Institute*.
- Shambaugh, D. (2013). Assessing the US "pivot" to Asia. *Strategic Studies Quarterly*
- Supriyanto, R. A. (2016). Out of Its Comfort Zone: Indonesia and the South China Sea. *Asia Policy*, National Bureau of Asian Research (NBR).
- Tsinghua University Entrepreneur Research Center, China Overseas Chinese Studies Institute. (2019). History of Overseas Chinese in the "Belt and Road" Series . *Guangdong University Press*.
- Ujvari, B. (2019). The Belt and Road Initiative-the Asean Perspective. *Egmont Institute*.
- Xiaoqian, Z. (2016). Research on The "Re-Huahua" Phenomenon of Chinese Indonesians in the 21st Century. *World Nation 2016*, Issue 1, Chinese Academy of Social Sciences.
- Xue, G. (2020). China's Economic Statecraft. *Institute for Regional Security*.
- Yanuar Pamungkas, H. e. (2013). Kehadiran Armada Militer Amerika Serikat Pada Sengketa Kepulauan Spratly Tahun 2011. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*.
- Yingying, K. (2018). Chinese Immigration Under the Belt and Road Initiative: Taking Singapore and Malaysia as Examples. *Ningbo Library*.
- Yuanyuan, C., & Mengling, A. (2018). How Chinese and Overseas Chinese Participate in the One Belt One Road Series: Thailand . *Global Website*.
- Yudilla, A. (2019). KERJASAMA INDONESIA CINA DALAM BELT AND ROAD INITIATIVE. *Journal of Diplomacy and International Studies*.
- Yun, F. (2018). Overseas Chinese in Laos and The "Belt and Road" Construction. *Center for Foreign Studies of Yunnan University*.
- Zhang, Z., & Weiwei, J. (2018). "Belt and Road" Related Regions and National Overseas Chinese Situation Observation. *Jinan University Press*.

Majalah

Clinton, H. R. (2011). *America's Pacific Century*. U.S. Department of State through Foreign Policy Magazine.

Artikel Online

Australia to pursue nuclear-powered submarines through new trilateral enhanced security partnership. (2021, September 16). Retrieved from Prime Minister of Australia: <https://www.pm.gov.au/media/australia-pursue-nuclear-powered-submarines-through-new-trilateral-enhanced-security>

Bollerdo, J. (2021, Oktober 14). PH-US Balikatan Exercise back in 'full scale' for 2022. Retrieved from Rappler: <https://www.rappler.com/nation/philippines-agrees-hold-military-activities-with-united-states-2021/>

Calmes, J. (2016, November 11). What Is Lost by Burying the Trans-Pacific Partnership? Retrieved from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2016/11/12/business/economy/donald-trump-trade-tpp-trans-pacific-partnership.html>

CNN Indonesia. (2021, Agustus 5). Retrieved from Garuda Shield 2021: Latihan Tempur TNI AD-Militer AS Terbesar: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210805070517-20-676595/garuda-shield-2021-latihan-tempur-tni-ad-militer-as-terbesar>

Council on Foreign Relations. (n.d.). China's Maritime Disputes. Retrieved from <https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes>

CSIS China Power. (n.d.). How much trade transits the South China Sea. Retrieved from <https://chinapower.csis.org/much-trade-transits-south-china-sea/#:~:text=The%20United%20Nations%20Conference%20on,one%2Dthird%20of%20global%20shipping>

Darlis, A. M. (2021, Agustus 2018). Catatan dari Garuda Shield 2021. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/opini/426285/catatan-dari-garuda-shield-2021>

Garuda Shield 2021: Latihan Tempur TNI AD-Militer AS Terbesar. (2021, Agustus 5). Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210805070517-20-676595/garuda-shield-2021-latihan-tempur-tni-ad-militer-as-terbesar>

Grossman, D. (2018, Oktober 22). The Quad Needs Broadening to Balance China—and Now's the Time to Do It. Retrieved from Rand Corporation: <https://www.rand.org/blog/2018/10/the-quad-needs-broadening-to-balance-china-and-nows.html>

Hazmi, A. (2020, Januari 21). What is "ASEAN Way" ? Retrieved from Seasia: <https://seasia.co/2020/01/21/what-is-asean-way>

Hutt, D. (2021, Oktober 7). Sungai Mekong Jadi Sengketa Panas Baru di Indo-Pasifik. Retrieved from DW.com: <https://www.dw.com/id/sungai-mekong-jadi-sengketa-panas-baru-di-indo-pasifik/a-58877358>

International Military Education & Training. (n.d.). Retrieved from Defense Security Cooperation Agency: <https://www.dscamilitaryeducationtraining.com/>

Jafkhairi. (2011, Juni 17). Latihan Bersama. Retrieved from Antara Foto: <https://www.antarafoto.com/mudik/v1308309613/latihan-bersama>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 10). Indonesia dan Amerika Serikat Sambut Perayaan 70 Tahun Hubungan Bilateral. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/173/berita/indonesia-dan-amerika-serikat-sambut-perayaan-70-tahun->

- Article-View/Article/2584210/us-and-philippine-forces-conclude-36th-balikatan-exercise/
United States and Indonesia Commit to Advance Democracy and Social Justice Globally Through Bali Democracy Forum and Summit for Democracy. (2021, Desember 9). Retrieved from US Embassy Indonesia: <https://id.usembassy.gov/united-states-and-indonesia-commit-to-advance-democracy-and-social-justice-globally-through-bali-democracy-forum-and-summit-for-democracy/>
- Vietnam accepts US\$348 mil loan to boost South China Sea defence. (n.d.). Retrieved from FMT NEWS: <https://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2020/07/28/vietnam-accepts-us348-mil-loan-to-boost-south-china-sea-defence/>
- United States and Indonesia Commit to Advance Democracy and Social Justice Globally Through Bali Democracy Forum and Summit for Democracy. (2021, Desember 9). Retrieved from US Embassy Indonesia: <https://id.usembassy.gov/united-states-and-indonesia-commit-to-advance-democracy-and-social-justice-globally-through-bali-democracy-forum-and-summit-for-democracy/>
- Vietnam accepts US\$348 mil loan to boost South China Sea defence. (n.d.). Retrieved from FMT NEWS: <https://www.freemalaysiatoday.com/category/world/2020/07/28/vietnam-accepts-us348-mil-loan-to-boost-south-china-sea-defence/>
- Ziezulwicz, G., & Snow, S. (2020, Januari 2020). "Navy conducts year's first FONOP in South China Sea." Retrieved from Defense News: <https://www.navytimes.com/news/your-navy/2020/01/28/navy-conducts-years-first-fonop-in-south-china-sea/>